

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Periode 2020-2024 Melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah

Reza Armevia^{1*}, Difani Fatikasari², Aufali Firhamdi³, Fitri Yeni⁴, Fredella Azaria Kafrianti⁵, Siska Yulia Defitri⁶, Witra Maison⁷

¹⁻⁷ Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia
Email Correspondensi: rarmevia@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Bogor City Government during the 2020–2024 period using a regional financial ratio approach. The study employs a quantitative descriptive method based on secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) of Bogor City. The results indicate that the financial performance of Bogor City generally improved over the study period. The financial independence ratio increased from 61.60% in 2020 to 85.21% in 2024, reflecting the growing ability of the local government to finance its activities through Local Own-Source Revenue (PAD). The effectiveness ratio was classified as effective, with an average of 106.02%, indicating that revenue targets were successfully achieved. Furthermore, regional revenue growth showed a positive trend, averaging 4.92% annually after experiencing a decline in 2020 due to the COVID-19 pandemic. However, the efficiency ratio remained inefficient because regional expenditures exceeded the revenues generated. In addition, the expenditure structure was still dominated by operational spending, while the proportion of capital expenditure remained relatively low. Overall, the Bogor City Government demonstrated satisfactory financial performance in terms of increasing revenue and financial independence. Nevertheless, greater efforts are needed to improve budget efficiency and increase development-oriented expenditures to support sustainable regional development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor periode 2020–2024 menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah dengan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Bogor secara umum mengalami perbaikan. Rasio kemandirian meningkat dari 61,60% pada tahun 2020 menjadi 85,21% pada tahun 2024 menunjukkan meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui (PAD). Rasio efektivitas berada pada kategori efektif dengan rata-rata 106,02%, yang menunjukkan bahwa target PAD dapat dicapai dengan baik. Pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan tren positif dengan rata-rata 4,92% per tahun setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun, rasio efisiensi masih tergolong tidak efisien karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Selain itu, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, sedangkan porsi belanja modal relatif rendah. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Bogor telah menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, namun masih perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan alokasi belanja yang mendukung pembangunan daerah.

KEYWORDS:

regional financial performance, financial ratios, local own-source revenue, regional budget, Bogor City.

KATA KUNCI:

kinerja keuangan daerah, rasio keuangan, PAD, APBD, Kota Bogor.

How to Cite:

“Armevia, R., Fatikasari, D. ., Firhamdi, A. ., Yeni, F. ., Kafrianti, F. A. ., Defitri, S. Y. ., & Maison, W. . (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Periode 2020-2024 Melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(1), 140-155.”

PENDAHULUAN

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa pra reformasi/ orde baru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang tersebut selain mengatur pemerintahan daerah, juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2010). Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah memiliki wewenang sebagai actor utama dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, memberikan pelayanan publik, pembangunan wilayah berkelanjutan (Afandi et al., 2025) Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Rahayu et al., 2019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban dari pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatur serta mengurus urusan dan kepentingan pemerintah serta masyarakat di daerahnya masing masing. Prinsip dasar dalam pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pihak eksternal terutama Pemerintah Pusat atau Provinsi (Defitri, 2020) Melalui otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat mengatur segala sesuatu yang ada di daerahnya masing-masing termasuk dalam keuangan daerah (Marselina et al., 2023) Pemerintah daerah memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatur segala pemasukan dan pengeluaran daerahnya (Rafsanjani & Sumiati, 2024) APBD berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan rencana keuangan daerah dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan pada peraturan daerah (Perda). APBD dapat menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dari segi keuangan. APBD berisi tentang pendapatan daerah yang dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. APBD juga berisi belanja daerah, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Selain itu, dalam APBD juga terdapat pembiayaan daerah yang merupakan pendapatan atau pengeluaran daerah yang memerlukan penerimaan atau pembayaran kembali di kemudian hari.

Otonomi daerah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan, di mana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah daerah harus mengelola keuangan dengan baik Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yaitu Daerah Kota Bogor yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta memenuhi Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dituntut

semakin efektif, efisien, dan akuntabel (Kartika, 2023). Sehingga kualitas pengelolaan APBD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Meskipun demikian, dalam proses implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia banyak daerah menghadapi berbagai tantangan. Banyak pemerintah daerah belum menunjukkan pengelolaan APBD dengan baik dan masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif (Defitri, 2020). Sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan sebagai sumber pendapatan utama daerah untuk pengelolaan daerah belum berkontribusi dengan optimal (Pundissing et al., 2020); (Rohmah et al., 2025). Di sisi lain, Tingkat efektivitas pemungutan pendapatan dan efisiensi realisasi APBD masih menjadi perhatian di berbagai daerah. Kondisi ini mendorong terjadinya penurunan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan Pembangunan daerah (Habibi et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara berkala dalam upaya perumusan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah adalah dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah dengan melakukan Analisa pada beberapa aspek Rasio Keuangan daerah seperti: Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Kesenjangan Belanja (Akuba et al., 2024); (Dewi et al., 2026). Berdasarkan perhitungan rasio-rasio tersebut Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan struktur keuangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah (Yulsiati & Negeri Sriwijaya, n.d.) Revalia, 2020. Dengan demikian, analisis Rasio Keuangan bukan hanya instrumen evaluasi, melainkan dasar pengambilan Keputusan demi peningkatan pendapatan efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah.

Kota Bogor merupakan salah satu daerah strategis dan memiliki peran penting di Provinsi Jawa Barat sebagai penyangga utama daerah metropolitan Provinsi Jakarta. Kota Bogor memiliki karakteristik didominasi oleh sektor tersier, yaitu perdagangan, jasa, dan pariwisata. Sehingga pertumbuhan dan Pembangunan daerah kota Bogor merupakan aspek yang perlu diperhatikan dan diupayakan. Posisi tersebut memberikan peluang besar dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dan percepatan Pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD terutama pendapatan sektor pajak daerah, retribusi, dan aktivitas ekonomi lainnya (Purba & Hutabarat, 2017).

Posisi strategis Kota Bogor mengharuskan kota bogor untuk memiliki pengelolaan APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran periode 2020-2024 menunjukkan bahwa besarnya Kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kota Bogor masih mengalami

fluktuasi dan belum sepenuhnya optimal untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 1 diatas, struktur pendapatan Kota Bogor selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa PAD dan Total Pendapatan cenderung mengalami peningkatan. Namun, proporsi Dana perimbangan yang diterima pemerintah Daerah Kota Bogor masih menjadi tumpuan dalam pengelolaan Daerah dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor masih memiliki ketergantungan pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar dan memiliki peluang besar di masa mendatang. Selain itu, fluktuasi PAD juga berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjaga kemandirian fiskal keuangan daerah secara keseluruhan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji terkait kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah masih belum sepenuhnya mandiri yang mencerminkan ketergantungan terhadap Dana Transfer (Rohmah et al., 2025);(Dewi et al., 2026) Di sisi lain, beberapa daerah telah berupaya menunjukkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik. Meskipun efisiensi pengelolaan anggaran dan struktur belanja yang perlu dioptimalkan (Rahayu et al., 2019) Temuan tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah bersifat dinamis dan berbeda antar daerah, sehingga dibutuhkan evaluasi secara khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Meskipun studi mengenai kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih terbatas pada penggunaan rasio keuangan secara parsial serta belum mengintegrasikan berbagai indikator kinerja dalam satu analisis yang komprehensif. Kajian yang mengintegrasikan berbagai indikator rasio keuangan secara komprehensif masih relatif terbatas, khususnya pada daerah dengan kepadatan penduduk dan tingkat hunian yang ramai seperti Kota Bogor. Fase 2020 hingga 2024 merupakan fase pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang berpotensi mempengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah (Karina & Wibowo, 2022) Kondisi ini memberikan Gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan sebagai

dasar pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

Kebaruan Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan rasio keuangan daerah secara komprehensif yang mengintegrasikan Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Keserasian Belanja. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengkaji dinamika kinerja keuangan daerah pada wilayah strategis yang memiliki Tingkat hunian yang tinggi khususnya Kota Bogor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2020–2024 melalui pendekatan rasio keuangan daerah yang mencakup rasio kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian diharapkan memberikan Gambaran empiris mengenai kondisi fiskal daerah serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, penguatan kemandirian fiskal, dan optimalisasi pengelolaan APBD secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2023) Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian, menganalisis data kuantitatif berupa angka dengan statistik. Penelitian ini ditujukan untuk menjabarkan serangkaian deskripsi berupa kalimat terkait kondisi kinerja keuangan daerah Kota Bogor tanpa melakukan pengujian hipotesis (Iskandar, 2022)

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor periode 2020–2024. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), total Pendapatan Daerah, serta Belanja Daerah.

Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis dokumen lebih mengarah pada bukti data yang konkret kemudian melakukan analisa terhadap isi dokumen-dokumen relevan dengan permasalahan yang dapat mendukung penelitian (Jaya, 2025) Proses pengumpulan data dimulai dengan menentukan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan, kemudian menelusuri sumber dokumen yang relevan, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bogor periode 2020–2024. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang meliputi Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Keserasian Belanja (Kartika, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan merupakan Gambaran kemampuan suatu daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan ketersediaan dana yang diperoleh dari pihak lain di luar pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Sumber dana tersebut meliputi sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti Dana Transfer, Dana perimbangan maupun dana bagi Hasil pemerintah daerah yang lain (Rohmah et al., 2025) Menurut (Bakar & Said, 2021) rasio ini mencerminkan sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak dan retribusi, mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana perimbangan}} \times 100\%$$

Untuk menilai rasio kemandirian keuangan suatu Pemerintah Daerah, menurut (Hapsari et al., 2025) kriteria penilaian rasio ini dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria penilaian Rasio Kemandirian daerah

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Sangat Rendah
26% - 50%	Rendah
51% - 75%	Sedang
76% - 100%	Tinggi

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Bogor pada periode 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Kota Bogor 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian
2020	872.017242.152,12	1.415.498.666.396,00	61,60	Sedang
2021	1.075.240.926.213,11	1.463.000.794.326,00	73,49	Sedang
2022	1.147.623.045.708,92	1.639.426.533.844,00	70,00	Sedang
2023	1.338.618.268.168,80	1.628.857.302.371,00	82,18	Tinggi
2024	1.458.824.079.309,24	1.711.878.175.798,00	85,21	Tinggi

Berdasarkan tabel rasio kemandirian daerah Kota Bogor tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rasio kemandirian sebesar 61,60%, kemudian meningkat menjadi 73,49% pada tahun 2021. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 70,00% pada tahun 2022, rasio tersebut kembali meningkat menjadi 82,18% pada tahun 2023 dan mencapai 85,21% pada tahun 2024. Selama periode 2020–2022, tingkat kemandirian Kota Bogor berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup baik, namun masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2023 dan 2024, rasio kemandirian meningkat ke kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah semakin besar dibandingkan dana perimbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor semakin mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD, sehingga kinerja keuangan daerah menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas diukur dengan membandingkan target perolehan dan realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh. Menurut (Abdul Halim, 2007) rasio efektivitas ini diperoleh melalui rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai Rasio Efektivitas keuangan suatu Pemerintah Daerah, menurut(Hapsari et al., 2025) kriteria penilaian rasio ini dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria penilaian Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
$\leq 60\%$	Tidak Efektif

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, hasil perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kota Bogor pada periode 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Efektivitas Kota Bogor 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
2020	872.017.242.152,12	741.531.123.201,00	117,59	Sangat Efektif
2021	1.075.240.926.213,11	914.550.650.320,00	117,57	Sangat Efektif
2022	1.147.623.045.708,92	1.150.887.225.486,00	99,71	Efektif
2023	1.338.618.268.168,80	1.403.260.832.834,00	95,39	Efektif
2024	1.458.824.079.309,24	1.461.100.063.862,00	99,84	Efektif

Berdasarkan tabel rasio efektivitas PAD Kota Bogor tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio efektivitas masing-masing sebesar 117,59% dan 117,57%, yang termasuk kategori sangat efektif karena realisasi PAD berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bogor mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara sangat baik sehingga penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada target yang direncanakan.

Pada periode 2022–2024, rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 99,71%, 95,39%, dan 99,84%, namun masih berada dalam kategori efektif. Meskipun realisasi PAD pada periode tersebut tidak lagi melampaui target, capaian yang mendekati 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mampu merealisasikan hampir seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Bogor selama tahun 2020–2024 sebesar sekitar 106,02%, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dan pemungutan PAD tergolong sangat baik serta mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah yang relatif optimal.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Remanta & Ramadhan, 2024). Dalam konteks keuangan daerah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Menurut (Ainiel Riany Putri et al., 2025) Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya untuk memungut PAD}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai Rasio Efisiensi keuangan suatu Pemerintah Daerah, menurut (Hapsari et al., 2025) kriteria penilaian rasio ini dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria penilaian Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
90,01% - 100%	Kurang Efisien
80,01% - 90%	Cukup Efisien
60,01% - 80%	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kota Bogor pada periode 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rasio Efisiensi Kota Bogor 2020-2024

Tahun	Belanja	Pendapatan	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
	(Rp)	(Rp)	(%)	
2020	1.808.953.421.839,00	872.017.242.152,12	207,44	Tidak Efisien
2021	2.073.640.980.073,00	1.075.240.926.213,11	192,85	Tidak Efisien
2022	2.194.646.629.160,00	1.147.623.045.708,92	191,23	Tidak Efisien
2023	2.300.111.704.834,00	1.338.618.268.168,80	171,82	Tidak Efisien
2024	2.547.122.952.111,00	1.458.824.079.309,24	174,60	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Kota Bogor tahun 2020–2024, seluruh nilai rasio efisiensi berada di atas 100%, yaitu sebesar 207,44% pada tahun 2020, 192,85% pada tahun 2021, 191,23% pada tahun 2022, 171,82% pada tahun 2023, dan 174,60% pada tahun 2024. Rasio efisiensi yang melebihi 100% menunjukkan bahwa jumlah belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efisien karena pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pendapatan yang berhasil dihimpun. Oleh karena itu, selama periode penelitian, kinerja efisiensi keuangan Kota Bogor termasuk dalam kategori tidak efisien.

Meskipun demikian, terdapat tren perbaikan efisiensi dari tahun 2020 hingga 2023 yang ditunjukkan oleh penurunan rasio efisiensi dari 207,44% menjadi 171,82%. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah relatif lebih baik dibandingkan peningkatan belanja sehingga tingkat ketidakefisienan semakin berkurang. Namun, pada tahun 2024 rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 174,60%, yang menandakan bahwa laju pertumbuhan belanja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan pada tahun tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bogor perlu terus meningkatkan

pendapatan asli daerah serta mengendalikan pengeluaran agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio ini mengukur pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun, menunjukkan seberapa baik daerah dalam meningkatkan pendapatannya. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya (Ainiel Riany Putri et al., 2025) Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } t - 1}{\text{Pendapatan tahun } t - 1}$$

Berdasarkan kriteria rumus tersebut, hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Bogor pada periode 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Bogor 2020-2024

Tahun	PAD	Rasio Pertumbuhan	Keterangan
	(Rp)	(%)	
2019	2.503.920.227.893,86		
2020	2.428.579.503.649,12	(3,00)	Menurun
2021	2.644.780.935.777,11	8,90	Meningkat
2022	2.787.105.058.802,92	5,38	Meningkat
2023	2.967.475.570.539,80	6,47	Meningkat
2024	3.170.702.255.107,24	6,84	Meningkat
Rata-rata Pertumbuhan		4,92	Meningkat

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Kota Bogor tahun 2020–2024, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif sebesar -3,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yaitu dari Rp2,50 triliun menjadi Rp2,43 triliun. Penurunan tersebut dapat mengindikasikan adanya berkurangnya penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun sumber pendapatan lainnya. Namun, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, pendapatan Kota Bogor kembali menunjukkan tren positif pada tahun-tahun berikutnya.

Pada periode 2021–2024, rasio pertumbuhan pendapatan berturut-turut sebesar 8,90%, 5,38%, 6,47%, dan 6,84%, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan tahun-tahun berikutnya tetap mencatat pertumbuhan yang relatif stabil. Secara keseluruhan, rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan Kota Bogor selama periode pengamatan mencapai 4,92%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas pendapatannya dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Rasio Kekeragaman Belanja

Rasio Kekeragaman mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan alokasi anggarannya antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Rutin, maka porsi Belanja Pembangunan yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih kecil (Fathah, 2017)

Hasil perhitungan rasio yang lebih rendah menyimpulkan bahwa anggaran belanja dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka hasilnya akan semakin baik. Sejauh ini belum ada pedoman yang ideal untuk perhitungan proporsi belanja. Hal ini diakibatkan karena belanja daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika Pembangunan dan kebutuhan investasi dalam penyediaan infrastruktur masing-masing daerah (Karina & Wibowo, 2022)

Hasil dari rasio kekeragaman dapat menyimpulkan prioritas belanja pada suatu daerah. Menurut (Rafsanjani & Sumiati, 2024) Rasio Kekeragaman Belanja ini dapat dikur dengan rumus:

$$Rasio Belanja Operasi = \frac{Belanja Operasi}{Total Belanja} \times 100\%$$

$$Rasio Belanja Modal = \frac{Belanja Modal}{Total Belanja} \times 100\%$$

Untuk menilai Rasio Kekeragaman Belanja suatu Pemerintah Daerah, menurut (Natalia & Harsono, 2025) kriteria penilaian Rasio Belanja Operasi ini dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria penilaian Rasio Kekeragaman Belanja Operasi

Persentase	Kriteria
< 40%	Baik
40% - 80%	Cukup Baik
80% - 100%	Kurang Baik

Berdasarkan kriteria rumus tersebut, hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Bogor pada periode 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Bogor 2020-2024

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Keserasian Belanja Operasi (%)
2020	1.951.301.711.023	2.353.736.171.982	82,90
2021	2.195.790.762.074	2.636.065.820.905	83,29
2022	2.406.860.416.778	2.984.193.683.003	80,65
2023	2.508.123.306.971	2.027.354.930.109	82,84
2024	2.774.250.053.629	3.176.805.984.135	87,32

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasi Kota Bogor tahun 2020–2024, diperoleh nilai sebesar 82,90% pada tahun 2020, 83,29% pada tahun 2021, 80,65% pada tahun 2022, 82,84% pada tahun 2023, dan 87,32% pada tahun 2024. Mengacu pada kriteria yang digunakan, seluruh nilai rasio tersebut berada pada rentang 80%–100%, sehingga termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta kebutuhan rutin pemerintahan. Tingginya proporsi belanja operasi mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah masih lebih banyak difokuskan untuk mendukung aktivitas operasional dibandingkan pembiayaan pembangunan atau investasi jangka panjang.

Selain itu, rasio keserasian belanja operasi cenderung berfluktuasi namun tetap berada pada tingkat yang tinggi selama periode pengamatan. Rasio terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 80,65%, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 87,32%. Peningkatan rasio pada tahun 2024 menunjukkan bahwa porsi belanja operasi terhadap total belanja semakin besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas anggaran untuk membiayai belanja modal dan program pembangunan relatif lebih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu menjaga keseimbangan alokasi anggaran dengan meningkatkan proporsi belanja yang bersifat produktif dan berorientasi pada pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Untuk menilai Rasio Keserasian Belanja suatu Pemerintah Daerah, menurut (Natalia & Harsono, 2025) kriteria penilaian Rasio Belanja Modal ini dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 10. Kriteria penilaian Rasio Keserasian Belanja Modal

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Kurang Baik
10% - 40%	Cukup Baik

>40%	Baik
------	------

Berdasarkan kriteria rumus tersebut, hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Bogor pada periode 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Bogor 2020-2024

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Keserasian Belanja Modal (%)
2020	276.157.283.029	2.353.736.171.982	11,73
2021	418.874.649.797	2.636.065.820.905	15,89
2022	571.966.552.801	2.984.193.683.003	19,16
2023	400.367.986.619	2.027.354.930.109	13,22
2024	518.164.968.738	3.176.805.984.135	16,31

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal Kota Bogor tahun 2020–2024, diperoleh nilai rasio sebesar 11,73% pada tahun 2020, 15,89% pada tahun 2021, 19,16% pada tahun 2022, 13,22% pada tahun 2023, dan 16,31% pada tahun 2024. Mengacu pada kriteria yang digunakan, seluruh nilai rasio tersebut berada pada rentang 10%–40%, sehingga termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan investasi lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, proporsi belanja modal masih relatif lebih kecil dibandingkan total belanja daerah yang dikeluarkan setiap tahun.

Selama periode pengamatan, rasio keserasian belanja modal mengalami fluktuasi. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 19,16%, yang menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pembiayaan pembangunan dan pengadaan aset. Akan tetapi, pada tahun 2023 rasio tersebut menurun menjadi 13,22% sebelum kembali meningkat menjadi 16,31% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, seluruh rasio masih berada dalam kategori cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berupaya menyeimbangkan kebutuhan belanja operasional dengan belanja yang bersifat produktif untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah periode 2020–2024, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor secara umum menunjukkan tren yang positif, terutama dari aspek kemandirian keuangan daerah, efektivitas pengelolaan PAD, dan pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio kemandirian meningkat dari 61,60%

pada tahun 2020 menjadi 85,21% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin besarnya kemampuan Kota Bogor dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini sejalan dengan karakteristik Kota Bogor sebagai kota jasa, perdagangan, dan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca-pandemi turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap dapat dikurangi.

Dari sisi efektivitas, Pemerintah Kota Bogor menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 106,02%. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi PAD bahkan mampu melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022–2024 realisasi pendapatan tetap berada pada kategori efektif. Kondisi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara tepat. Fenomena tersebut relevan dengan kondisi Kota Bogor yang pada periode pasca-Covid-19 mengalami pemulihan ekonomi cukup cepat, ditandai dengan kembali meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, pariwisata, dan sektor UMKM yang menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Meskipun demikian, hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Selama periode penelitian, rasio efisiensi berada di atas 100%, yang mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Situasi tersebut dapat dipahami mengingat Kota Bogor merupakan kota penyangga kawasan metropolitan Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi serta kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam mengendalikan belanja dan mengutamakan program-program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Selanjutnya, dari aspek keserasian belanja, struktur APBD Kota Bogor masih didominasi oleh belanja operasional dengan rasio di atas 80%, sementara proporsi belanja modal berada pada kategori cukup baik namun relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk mendukung aktivitas rutin pemerintahan dibandingkan investasi pembangunan jangka panjang. Padahal sebagai kota strategis yang terus berkembang, Kota Bogor membutuhkan peningkatan investasi pada sektor infrastruktur, transportasi, fasilitas publik, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kawasan ekonomi. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah Kota Bogor perlu menjaga keberhasilan dalam meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki efisiensi dan keseimbangan alokasi belanja agar kemandirian fiskal yang telah dicapai dapat diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

- Afandi, M. R., Ardiansyah, & Kamdani. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211–217. <https://doi.org/10.63822/e50m4s79>
- Ainiel Riany Putri, Agus Tripriyono, & Fitri Yani Panggabean. (2025). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 531–542. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.670>
- Akuba, I. A., Darmawati, & Kusumawati, A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan. *Al-Buhuts e-Journal*, 20.
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA. *JURNAL KRITIS*.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Dewi, C. W. K., Arini, A. P., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Periode 2020 – 2024 melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.253>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul *Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government Rigel Nurul Fathah a ARTICLES INFORMATION ABSTRACT E B B A N K* (Vol. 8, Number 1).
- Habibi, H., Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–489. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Iskandar, R. A. (2022). KAJIAN NILAI PERJUANGAN DALAM NOVEL MAHBUB DJUNAIDI DENGAN MENGGUNAKAN METODE DESKRIPTIF ANALISIS DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR NOVEL SEJARAH *STUDY OF THE STRUGGLE VALUE OF MAHBUB DJUNAIDI'S NOVEL USING ANALYSIS DESCRIPTIVE METHOD AND ITS UTILIZATION AS ALTERNATIVE HISTORY NOVEL TEACHING MATERIALS*. 5(2). https://alfkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
- Jaya, I. M. L. M. (2025). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF* (F. Husaini, M. Fikri, & D. Syahputra, Eds.; 5th ed.). Penerbit QUADRANT.

- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Kartika, Y. (2023). KINERJA KEUANGAN DAERAH: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, dan Share and Growth. *FAIR: FINANCIAL & ACCOUNTING*, 3.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IV)*. UPP STIM YKP.
- Marselina, D., Soselia, K. E., Ningrum, C. S., Pangestu, N. F., Lero, A. F., & Kristanti, P. (2023). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.438>
- Natalia, N. M. A. S. D., & Harsono, I. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2023. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.655>
- Pundissing, R., Pagiu, C., Kristen, U., Toraja, I., Kunci, K., Keuangan, K., Daerah, K., & Kinerja, R. (2020). ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. *Paulus Journal of Accounting*, 2(2).
- Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN DAIRI. *Jurnal Ilmiah Kohesi*.
- Rafsanjani, M., & Sumiati, S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 3(4), 395–408. <https://doi.org/10.21776/jmrk.2024.03.4.08>
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(443–450).
- Remanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara*. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/>.
- Rohmah, N., Nisa¹, C., & Wafa², Z. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023. *Economics & Education Journal*, 7(1). <http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/ecoducation>
- Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Yulsiati, H., & Negeri Sriwijaya, P. (n.d.). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 3(03), 186–200. <https://doi.org/10.58812/smb.v3i03>.